

**ANALISIS *PRESIDENTIAL TRESHOLD* 20% BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK PERSPEKTIF *FIQH*  
*SIYASAH* DAN HAK ASASI MANUSIA**



**TESIS**

Diajukan Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan  
Tesis Pada Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**ABDI KUSUMA  
NIM. 2011760023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
PASCASARJANA (S2)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2023**

**ANALISIS *PRESIDENTIAL TRESHOLD* 20% BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK PERSPEKTIF *FIQH*  
*SIYASAH* DAN HAK ASASI MANUSIA**



**TESIS**

**Diajukan Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penulisan Tesis Pada Program Studi Hukum Tata Negara**

**OLEH :**

**ABDI KUSUMA  
NIM. 2011760023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
PASCASARJANA (S2)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2023**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
SETELAH UJIAN TESIS**

**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. H. John Kenedi, SH, M. Hum**

**NIP. 196205031986031004**

**Pembimbing II,**



**Dr. Abdul Hafiz, M.Ag**

**NIP. 196605251996031001**



**Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara**



**Dr. Ismail Jalili, MA  
NIP. 19740618 200901 1 004**

**Nama** **Abdi Kusuma**

**NIM** **: 2011760023**

**No. Hp/WA** **: 082182194800**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS**

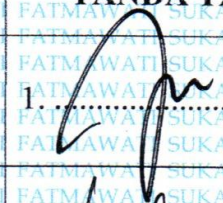
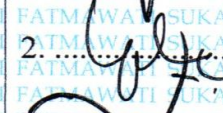
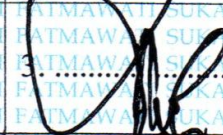

Tesis yang berjudul:

**“Analisis *Presidential Threshold* 20% Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Serentak Perspektif *Fiqh Siyash* dan Hak Asasi Manusia”**

Penulis

**ABDI KUSUMA**  
NIM. 2011760023


Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 November 2023.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Adisel, M.Pd (Ketua)	20-11-23	
2	Dr. Moch. Iqbal, M.SI (Sekretaris)	20-11-23	
3	Prof. Dr. H. John Kenedi, SH, M. Hum (Anggota)	15-11-2023	
4	Romi Aditiyo Setiawan, Ph. D (Anggota)	20-11-2023	

Mengetahui  
Rektor UINFAS Bengkulu,

  
Prof. Dr. H. Zulkarnain, M. Pd  
NIP. 19620101199403 1 005

Bengkulu, 13 November 2023  
Direktur PPs UINFAS Bengkulu,

  
Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag  
NIP. 19720611200501 1 002



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang sudah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bengkulu , 24 Juli 2023

Ver : menyatakan



1000  
REPUBLIK INDONESIA  
METAL  
TEMPER  
84AKX524812551  
NIM. 2011760023





**PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya

2. Kedua orang tuaku tercinta terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk anak mu ini. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.

3. Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu fokus agar bisa menyelesaikan keliah saya yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan S2 ini.

4. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.

5. Saya juga berterimakasih kepada bapak ibu, dosen, Ka Prodi, staf dan karyawan Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.

6. Untuk rekan seperjuanganku yang sama-sama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, yang selalu bersama dan dan saling membantu sampai di



akhir perkuliahan ini dan selalu saling support dan membantu, semoga  
kebaikan kita di balas oleh Allah SWT, amin

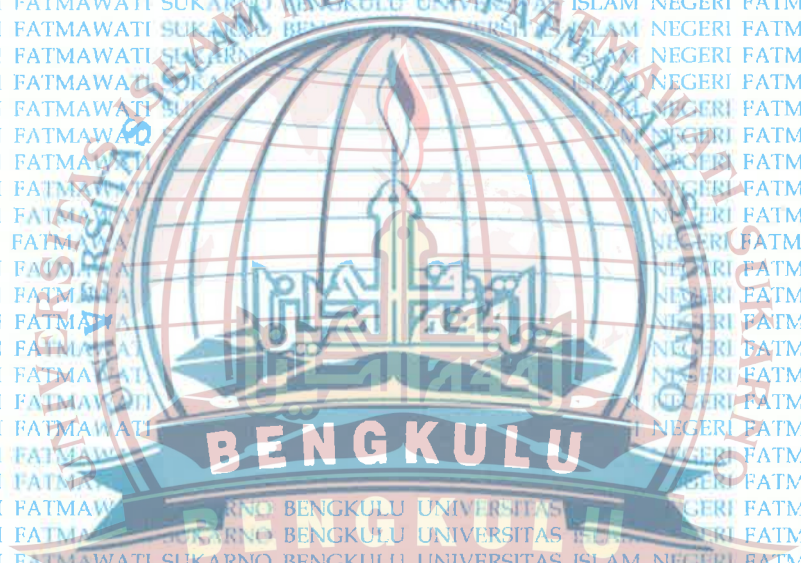
7. Semua teman-teman yang hebat dan baik hati, teman tongkrongan, Teman

Bisnis dan teman perkumpulan di dalam kampus maupun luar kampus, yang

telah memberi banyak pengalaman dan ilmu yang luar biasa semoga

silaturahmi selalu tersambung dan saling mendoakan.

8. Airmaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu





## ABSTRAK

ABDI KUSUMA : ANALISIS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* 20% BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* DAN HAK ASASI MANUSIA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan *presidential threshold* 20% dalam dimensi Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap *presidential threshold* 20% yang terkandung dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *library research* berbasis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) tidaklah melanggar nilai-nilai universal dan egaliter. *Presidential Threshold* dalam undang-undang ini adalah DPR yang memiliki legitimasi sebagai representasi rakyat Indonesia. Indonesia adalah satu-satunya negara penganut sistem presidensial yang menerapkan *Presidential Threshold*, maka dari itu dapat dikatakan sebagai ciri khas budaya demokrasi Indonesia yang sejalan dengan teori relativitas budaya Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan nilai-nilai lokal. berdasarkan pandangan *siyasah dusturiyah* selagi hal tersebut di tujukan untuk kepentingan orang banyak (negara dan rakyat) dan bukan ditujukan untuk kepentingan sekelompok orang sesuatu dengan kaidah yang artinya adalah "Kemaslahatan umum yang lebih luas (rakyat) harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)." serta mendapat manfaat dan terhindar dari kemudharatan sebagaimana sebuah kaidah yang mengatakan bahwa menghindari *mudharat* (bahaya) harus lebih diutamakan dari meraih manfaat

**Kata Kunci :** *Presidential Threshold*, Hak Asasi Manusia, *Siyasah Dusturiyah*.



## ABSTRACT

ABDI KUSUMA : ANALYSIS PRESIDENTIAL THRESHOLD 20%  
BASED ON LAW NUMBER 7 OF 2017  
CONCERNING CONVENIENT GENERAL  
ELECTIONS PERSPECTIVE OF FIQH  
SIYASAH AND HUMAN RIGHTS

The purpose of this research is to know how provisions for the presidential threshold of 20% in the dimensions of Law No.7 of 2017 concerning General Elections and a Human Rights Perspective (HAM) and how fiqh siyasah review of the presidential threshold of 20% is contained in Law No.7 of 2017 concerning General Elections. The method used in this research is library research based on qualitative. Based on the results of the study, the threshold for the nomination of the presidential and vice-presidential pair (Presidential Threshold) Article 222 of Law no. 7 of 2017 in view of Human Rights (HAM) does not violate universal and egalitarian values. There is no discrimination in the application of the Presidential Threshold in Indonesia, all parties, both individuals and groups, can nominate themselves or others to advance in the presidential election. The view of the universality theory of Human Rights regarding the Presidential Threshold does not violate the values of equality and equality of all human beings, because all Indonesian citizens can still run for the Presidential Election by fulfilling certain requirements and mechanisms. In the perspective of cultural relativity theory Human Rights (HAM) also do not violate the socio-cultural values of the Indonesian people, because the formulator of the Presidential Threshold in this law is the DPR which has legitimacy as a representative of the Indonesian people. Indonesia is the only country adhering to a presidential system that implements a Presidential Threshold, therefore it can be said to be a characteristic of Indonesian democratic culture which is in line with the cultural relativity theory of Human Rights (HAM) which prioritizes local values.

**Keywords: Presidential Threshold, Human Rights, Siyasañ Dusturiyah.**



## خلاصة

تحليل 20% على أساس القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن :  
الانتخابات العامة المريحة من منظور فقيه السياسة وحقوق  
الإنسان  
ABDI KUSUMA

الغرض من هذا البحث هو أعرف كيف أحكام الحد الرئاسي بنسبة 20% في أبعاد القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخابات العامة ومنظور حقوق الإنسان وكيف وردت مراجعة فقه السياسة للعتبة الرئاسية البالغة 20% في القانون رقم 7 لسنة 2017 بخصوص الانتخابات العامة الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي البحث المكتبي القائم على النوع. بناءً على نتائج الدراسة ، حد ترشيح الثنائي الرئاسي ونائب الرئيس (العتبة الرئاسية) المادة 222 من القانون رقم 7 لسنة 2017 في ضوء حقوق الإنسان (HAM) لا ينتهك القيم العالمية والمساواة لا يوجد أي تمييز في تطبيق العتبة الرئاسية في إندونيسيا ، يمكن لجميع الأحزاب ، أفرادًا وجماعات ، ترشيح أنفسهم أو غيرهم للتقدم في الانتخابات الرئاسية. إن وجهة نظر النظرية العالمية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعتبة الرئاسية لا تنتهك قيم المساواة والمساواة بين جميع البشر ، لأنه لا يزال بإمكان جميع المواطنين الإندونيسيين الترشح للانتخابات الرئاسية من خلال استيفاء متطلبات واليات معينة. من منظور نظرية النسبية الثقافية ، لا تنتهك حقوق الإنسان (HAM) أيضًا القيم الاجتماعية والثقافية للشعب الإندونيسي ، لأن صاغ العتبة الرئاسية في هذا القانون هو جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تتمتع بشرعية كمثل للإندونيسيين. الناس. إندونيسيا هي الدولة الوحيدة التي تنترم بالنظام الرئاسي الذي يطبق العتبة الرئاسية ، وبالتالي يمكن القول إنها سمة من سمات الثقافة الديمقراطية الإندونيسية التي تتماشى مع نظرية النسبية الثقافية لحقوق الإنسان (HAM) التي تعطي الأولوية للقيم المحلية.

الكلمات المفتاحية: عتبة الرئاسة ، حقوق الإنسان ، فقه السياسة.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul : “**Analisis Presidential Treshold 20% Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Serentak Perspektif *Fiqh Siyasa* dan Hak Asasi Manusia**”. Selama menulis Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak, berkenaan dengan itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Daii, M.Pd, Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tesis.
2. Prof. Dr. H. Rohimin M.Ag, Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tesis.
3. Dr. Ismail Jalili, M.A, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tesis.
4. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.



6. Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang selama penulis mengikuti perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seiruh staf dan karyawan Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
8. Kedua orang tua yang tak henti hentinya mendo'akan penulis dalam penyelesaian Tesis.
9. Suami dan anak-anak tercinta terima kasih atas semua dukungannya dalam dalam penyelesaian Tesis.
10. Teman-teman seperjuangan dan sahabat tercinta, terimakasih atas segala supportnya.

Penulis berharap semoga Tesis ini mendapat ridho dari Allah Swt dan bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Bengkulu, September 2022  
Penulis.

**Abdi Kusuma**  
NIM. 2011760023



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	vii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	viii
ABSTRAK BAHASA ARAB.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19

### BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Presidential Threshold</i> .....	21
1. Pengertian <i>Presidential Threshold</i> .....	21
2. Perkembangan Ketentuan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia .....	23
a. Pemilihan Umum Tahun 1999.....	23
b. Pemilihan Umum Tahun 2004.....	23
c. Pemilihan Umum Tahun 2009.....	24
d. Pemilihan Umum Tahun 2014.....	25
e. Pemilihan Umum Tahun 2019.....	26
3. Ketentuan <i>Presidential Threshold</i> Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....	29
B. Demokrasi .....	35
1. Pengertian Demokrasi .....	35
2. Prinsip Demokrasi .....	36
C. Hak Asasi Manusia .....	37
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	37
2. Peran dan Fungsi Negara dalam Melindungi HAM di Indonesia .....	39
D. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	41
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	41
2. Ruang Lingkup dan Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	43
3. Dasar Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	47
4. Lembaga Negara dalam Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	49

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	52
--	----



B. Sumber Bahan Hukum .....	53
1. Bahan Hukum Primer.....	54
2. Bahan Hukum Sekunder.....	54
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	55
D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	56
E. Pedoman Penulisan Tesis.....	56

**BAB IV ANALISIS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* UNDANG  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF HAM DAN  
*FIQH SIYASAH***

A. <i>Presidential Threshold</i> Dalam Pemilihan Umum .....	57
1. Pemilihan Presiden Pra Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ...	57
2. Pemilihan Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 .....	58
a. Pemilu Presiden 2004.....	58
b. Pemilu Presiden 2009.....	62
c. Pemilu Presiden 2014.....	64
d. Pemilu Presiden 2019.....	65
B. <i>Presidential Threshold</i> Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Hak Asasi Manusia .....	68
C. Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA**